

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

DSAK IAI menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada tahun 2009 yang dapat digunakan oleh entitas kecil dan menengah. Guna memenuhi kebutuhan UMKM maka DSAK IAI melakukan pengembangan standar akuntansi dengan membentuk suatu kelompok kerja yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menghadirkan SAK yang dapat mendukung kemajuan UMKM di Indonesia, yaitu dengan menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). SAK EMKM ini disahkan oleh DSAK IAI pada tahun 2016, disahkannya SAK EMKM guna mendukung perekonomian Indonesia agar dapat lebih berkembang. IAI yang merupakan organisasi profesi akuntan menerbitkan SAK EMKM ini guna memberi dukungan kepada UMKM agar dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan entitas, yang dapat mendorong pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia. SAK EMKM dapat mengatur transaksi umum yang dapat dilakukan oleh UMKM, oleh sebab itu standar akuntansi keuangan EMKM dapat dikatakan lebih sederhana dibanding dengan SAK ETAP. SAK EMKM cukup mencatat asset dan liabilitas sebesar biaya perolehannya dikarenakan Dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018b)

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), SAK EMKM merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, yang memenuhi definisi serta kriteria ekonomi mikro kecil dan menengah sebagaimana telah diatur didalam perundang-undangan paling tidak selama dua tahun berturut-turut (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 2018:1). Yang digunakan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yaitu entitas yang:

- a. Tidak mempunyai akuntabilitas publik yang signifikan. Suatu entitas dikatakan memiliki akuntabilitas publik yang signifikan apabila :
 - 1) Entitas sedang dalam pengajuan suatu pernyataan pendaftaran atau sudah mengajukannya pada otoritas pasar modal ataupun kepada regulator lain dengan bertujuan menerbitkan efek pada pasar modal.
 - 2) Entitas dapat menguasai suatu aset dalam kapasitasnya sebagai *fidusia* untuk masyarakat, seperti entitas asuransi, bank, pedagang efek atau pialag, reksadana, bank investasi dan dana pensiun.
- b. Menerbitkan suatu laporan keuangan sebagai tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna luar.

Melihat bahwa sejauh ini usaha kecil dan menengah termasuk dalam entitas tanpa akuntabilitas publik, maka standar akuntansi bagi perusahaan adalah SAK EMKM. (Sihite, 2020)

Informasi posisi keuangan entitas terdiri atas asset, ekuitas, liabilitas, entitas pada tanggal tertentu, yang dapat disajikan kedalam laporan posisi keuangan. Unsur-unsur tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Aset

Aset merupakan sumber daya yang dimiliki entitas akibat peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomik pada masa depan yang diharapkan diterima oleh entitas. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018:3). Manfaat ekonomik masa depan suatu aset merupakan potensi aset itu sendiri guna memberikan kontribusi, secara langsung ataupun tidak

langsung terhadap suatu arus kas entitas, arus kas dapat timbul akibat pelepasan aset ataupun penggunaan aset. Beberapa aset mempunyai wujud dan beberapa aset juga tidak mempunyai wujud (takberwujud).

2. Liabilitas

Kewajiban entitas yang terjadi melalui peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya entitas yang dapat mengandung manfaat ekonomik merupakan pengertian dari liabilitas. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018:3). Liabilitas mempunyai karakteristik *essential* yaitu entitas mempunyai suatu kewajiban yang dapat bertindak untuk melakukan sesuatu dengan cara yang tertentu. Kewajiban tersebut berupa kewajiban *konstruktif* atau kewajiban hukum. Kewajiban *konstruktif* merupakan kewajiban yang dapat timbul akibat dari tindakan entitas yaitu pada saat:

- a) Praktik baku masa lalu, kebijakan sudah dipublikasikan secara spesifik, diaman entitas sudah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwasanya entitas akan menerima suatu tanggungjawab tertentu
- b) Akibatnya, timbul ekspektasi yang kuat dan sah dari pihak lain bahwasanya entitas akan melaksanakan suatu tanggung jawab tersebut.

Penyelesaian kewajiban melibatkan penyerahan aset selain kas, pembayaran kas, penggantian kewajiban dan pemberian jasa tersebut dengan kewajiban lainnya, selain itu kewajiban juga dapat diselesaikan dengan cara kreditor membatalkan atau membebaskan haknya.

3. Ekuitas

Ekuitas merupakan hak residual suatu aset kepada entitas ketika liabilitasnya sudah dikurangi. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018:4). Informasi kinerja keuangan entitas dapat terdiri dari informasi beban dan penghasilan selama periode pelaporan yang disajikan didalam laporan laba rugi. Unsur-unsur tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut;

- a) Penghasilan (*income*) merupakan kenaikan suatu manfaat ekonomik selama periode pelaporan dalam bentuk penurunan liabilitas maupun arus kas masuk, yang menimbulkan peningkatan ekuitas yang tidak berasal dari suatu kontribusi penanam modal.
- b) Beban (*expense*) merupakan penurunan suatu manfaat ekonomik selama periode pelaporan dalam bentuk kenaikan liabilitas maupun penurunan aset yang dapat mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanaman modal.

Beban dan pengakuan penghasilan laporan laba rugi diperoleh secara langsung melalui pengakuan aset dan liabilitas. Penghasilan (*income*) terbagi atas dua yaitu keuntungan (*gains*) dan pendapatan (*revenues*). Penghasilan yang timbul melalui pelaksanaan suatu aktivitas entitas yang baik atau normal, yang dapat dikenal dengan sebutan imbalan, penjualan, dividen, royalti, bunga dan sewa merupakan pengertian dari pendapatan. Yang memenuhi definisi penghasilan adalah keuntungan yang mencerminkan pos lainnya, akan tetapi tidak termasuk didalam katagori pendapatan.

Beban mencakup pelaksanaan suatu aktivitas entitas yang normal dan rugi. Penyusutan, upah dan beban pokok penjualan merupakan suatu beban yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal. Yang dapat memenuhi definisi beban yaitu suatu kerugian yang mencerminkan pos lain akan tetapi tidak termasuk dalam kategori beban yang timbul melalui pelaksanaan aktivitas entitas yang normal contohnya: kerugian dari pelepasan aset.

A. Pengakuan dan Pengukuran Unsur-unsur Laporan Keuangan

Pengakuan suatu unsur laporan keuangan adalah proses pembentukan suatu pos dalam laporan laba rugi atau laporan posisi keuangan yang memenuhi definisi dari aset, ekuitas, liabilitas beban dan penghasilan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Manfaat ekonomik yang terkait dengan pos bisa dipastikan mengalir keluar ataupun kedalam suatu entitas.
2. Pos memiliki biaya yang bisa diukur dengan andal.

Manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir kedalam atau keluar dari suatu entitas hal tersebut merupakan kriteria dari pengakuan. Kriteria selanjutnya dalam pengakuan suatu pos yaitu adanya biaya yang bisa diukur dengan baik. Jika pos tidak bisa disajikan dan tidak bisa diakui dalam laporan laba rugi ataupun laporan posisi keuangan maka pengukuran tidak dapat dilakukan.

Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang guna mengakui penghasilan, aset, beban dan liabilitas, di dalam laporan keuangan. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018:4). Dasar dari pengukuran laporan keuangan UMKM yang ditetapkan pada SAK EMKM yaitu biaya historis.

Jumlah kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset pada saat perolehan merupakan pengertian dari biaya historis suatu aset. Biaya historis suatu liabilitas diperkirakan dapat dibayar agar memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha yang normal. Informasi yang relevan dapat dipengaruhi oleh materialitasnya. Kelalaian dalam mencatat (*misstatement*) atau mencatumkan (*omission*) pos-pos laporan keuangan material yaitu apabila sendiri maupun bersama, bisa mempengaruhi sebuah keputusan ekonomik dalam suatu pengguna laporan keuangan. Materialitas sangat bergantung kepada sifat dan ukuran suatu kelalaian guna memasukkan suatu kesalahan dalam mencatat dengan memperhatikan keadaan yang ada.

Persyaratan dalam suatu pengukuran dan pengakuan aset, liabilitas, beban dan penghasilan pada SAK EMKM dapat didasarkan pada suatu prinsip *pervasife* dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan.

Entitas menyusun sebuah laporan keuangan yaitu dengan menggunakan dasar akrual. Pada dasar akrual, pos-pos dapat diakui sebagai penghasilan, liabilitas, aset, ekuitas, dan beban ketika dapat memenuhi kriteria dari pengakuan kepada masing-masing pos.

Dalam membuat suatu laporan keuangan, guna melakukan penilaian atas kemampuan entitas dalam melanjutkan usahanya dimasa depan manajemen menggunakan SAK EMKM. Entitas akan mengungkapkan fakta bahwa entitas tidak mempunyai kelangsungan usaha jika entitas tidak menyusun laporannya berdasarkan asumsi kelangsungan usaha.

B. Prinsip – Prinsip Pengakuan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Menurut IAI dalam SAK EMKM (2018) prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran dalam SAK EMKM yang berlaku untuk setiap elemen yang membentuk laporan keuangan, yaitu:

a. Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan yang berupa *instrument* ekuitas entitas lain dan kas serta hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas lain merupakan definisi dari aset keuangan menurut IAI yang tertuang didalam SAK EMKM (2018:19).

Jika entitas menjadi salah satu pihak dalam persyaratan kontraktual aset dan liabilitas keuangan maka entitas sudah mengakui aset dan liabilitas keuangannya. Liabilitas keuangan dan aset keuangan dapat diukur sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan suatu aset dan liabilitas keuangan bisa dinilai dari harga transaksi (*transaction price*). Berikut contoh harga transaksi aset dan liabilitas keuangan:

- a) Untuk pinjaman, harga transaksinya sebesar jumlah pinjaman
- b) Untuk piutang atau utang, harga transaksinya sebesar jumlah tagihan.
- c) Untuk investasi pada instrumen ekuitas dan instrumen utang, harga transaksinya sebesar imbalan yang telah diberikan

Biaya yang terhubung secara langsung kepada akuisisi aset dan liabilitas keuangan merupakan pengertian dari biaya transaksi (*transaction cost*). Biaya transaksi dapat diakui sebagai beban dalam suatu laporan laba rugi. contohnya, entitas yang menerima suatu pinjaman dari bank sebagai syarat agar mendapatkan pinjaman maka bank mengenakan biaya tertentu. Entitas dapat mencatat suatu biaya transaksi atas pinjaman sebagai beban pada laporan laba rugi.

Pelaporan pada akhir periode, suatu entitas dapat mengukur aset dan liabilitas keuangannya pada:

- 1) Harga transaksi
- 2) Mengurangkan seluruh pembayaran pokok dan penerimaan bunga sampai dengan tanggal tersebut.

b. Persediaan

Menurut IAI SAK EMKM (2018:21), persediaan merupakan aset yang dijual dalam kegiatan normal, dalam proses produksi yang dijual, dalam bentuk bahan atau perlengkapan yang digunakan untuk proses produksi atau pemberian jasa.

Entitas bisa mengakui persediaannya ketika persediaan diperoleh sebesar biaya perolehannya. Yang mencakup biaya perolehan persediaan yaitu seluruh biaya konversi, biaya pembelian, dan biaya lainnya guna membuat persediaan ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan. Demi kemudahan, maka teknik pengukuran biaya persediaan yaitu metode eceran atau metode biaya standar dapat digunakan jika hasilnya bisa mendekati biaya perolehan.

Dalam menentukan suatu biaya perolehan persediaan, entitas dapat menggunakan rumus biaya yaitu masuk-pertama keluar-pertama (MPKP) atau dengan rata-rata tertimbang. Jumlah suatu persediaan yang berkurang atau hilang, contohnya karena persediaan yang rusak atau dihapus bukukan, dapat diakui sebagai beban pada saat terjadinya penurunan atau kerugian.

c. Investasi dan Ventura Bersama

Menurut IAI yang tertuang dalam SAK EMKM (2018:23), Pengaturan secara bersama ketika para pihak memiliki suatu pengendalian bersama untuk memiliki suatu hak atas aset neto pengaturan disebut sebagai ventura bersama.

Pengukuran meliputi:

- a) Entitas mengukur investasi ventura bersamanya pada suatu biaya perolehan.
- b) Entitas tidak mengakui penurunan nilai atas investasi pada ventura bersama.

d. Aset Tetap

Pengakuan dan pengukuran aset tetap meliputi:

- a) Dalam menentukan pengakuan aset tetap, entitas menerapkan kriteria pengakuannya, oleh sebab itu, entitas dapat mengakui suatu pengeluaran sebagai biaya perolehan aset tetap, apabila:
 - 1) Manfaat suatu ekonomi bisa dipastikan mengalir dari entitas
 - 2) biaya dapat diukur secara andal.
- b) Tanah dan bangunan merupakan kekayaan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipisahkan secara terpisah, walaupun tanah dan bangunan diterima secara bersamaan.

- c) Aset tetap dapat dicatat ketika aset tetap secara hukum dimiliki entitas sebesar biaya perolehannya
- d) Biaya perolehan suatu aset tetap dapat meliputi harga beli dan biaya-biaya yang diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi yang diperlukan agar aset dapat digunakan sesuai dengan intensinya.
- e) Jika suatu aset tetap diterima melalui pertukaran dengan aset lain, maka biaya perolehan suatu aset tetap dapat diukur pada jumlah tercatat aset yang diserahkan.

e. Aset Takberwujud

Aset yang diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud merupakan Aset takberwujud. Aset takberwujud dapat diperoleh dengan cara terpisah, apabila:

- a) Entitas dipastikan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut
- b) Biaya perolehan suatu aset bisa diukur secara andal.

Entitas dapat mengukur aset yang takberwujud diterima secara terpisah untuk beban yang dibayar di muka sebanyak biaya perolehannya. Biaya perolehan suatu aset takberwujud meliputi biaya-biaya yang diatribusikan secara langsung untuk mempersiapkan aset yang dapat digunakan sesuai dengan kegunaannya.

Aset takberwujud dihasilkan secara internal dapat diakui sebagai beban ketika dapat terjadi. Contoh suatu pengeluaran yang dapat diakui sebagai beban dan bukan sebagai aset takberwujud yaitu:

- 1) Pengeluaran aktivitas riset dan pengembangan;
- 2) Pengeluaran judul publikasi, logo, merek, dan daftar konsumen yang dihasilkan secara internal, dan hak lain yang sama;
- 3) Biaya perintisan, termasuk kedalam biaya legal dan kesekretariatan dalam rangka mendirikan suatu entitas hukum, pengeluaran dalam rangka membuka suatu usaha atau fasilitas baru guna memulai suatu operasi baru untuk meluncurkan proses atau produk yang baru;
- 4) Aktivitas pelatihan;
- 5) Aktivitas promosi dan periklanan;

f. Liabilitas dan Ekuitas

Jika suatu pengeluaran sumber daya mengandung manfaat ekonomi yang dapat dipastikan agar dilakukan guna menyelesaikan kewajiban suatu entitas serta jumlah yang diselesaikan diukur secara andal maka liabilitas dapat diakui dalam laporan posisi keuangannya. Liabilitas harus tercatat sebesar jumlah yang dibayarkan.

Entitas tidak mengakui provisi dan liabilitas kontinjensi, namun entitas dapat mengungkapkan adanya provisi dan liabilitas kontinjensi jika material. Entitas tidak diperkenankan untuk mengakui aset kontinjensi sebagai suatu aset.

g. Pendapatan dan Beban

Menurut IAI dalam SAK EMKM (2018: 31), pendapatan dapat diterima jika terdapat suatu hak atas pembayaran yang diperoleh atau masih diperoleh pada masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Entitas mencatat suatu pendapatan agar manfaat ekonomi diterima secara bruto. Agar menjadi bagian dari suatu pihak ketiga maka entitas mengeluarkan pendapatannya dari sejumlah nilai seperti pajak atas barang dan jasa, pajak penjualan, dan pajak pertambahan nilai. Dalam suatu hubungan komunitas, entitas hanya mencatat pendapatannya sebesar jumlah komisi. Suatu jumlah yang dapat diperoleh dari pihak prinsipal tidak merupakan suatu pendapatan entitas. Ketika suatu barang/jasa telah terjual ataupun diberikan ke pelanggan maka disitulah entitas dapat mengakui pendapatannya melalui penyediaan jasa atau penjualan barang atau.

h. Pajak Penghasilan

Dengan mengikuti suatu peraturan perpajakan yang berlaku saat ini maka entitas mengakui suatu liabilitas dan aset pajak penghasilan. Entitas tidak dapat mengakui suatu aset dan juga liabilitas pada pajak tangguhannya.

i. Transaksi dalam Mata Uang Asing

Transaksi ini merupakan suatu transaksi yang diminasi pada mata uang asing meliputi suatu transaksi yang timbul ketika:

- a. Entitas menjual dan membeli barang/jasa yang dominasi harganya berupa mata uang asing;
- b. Entitas meminjam dan meminjamkan suatu dana berupa sejumlah utang/piutang yang didenominasikan pada mata uang asing;
- c. Entitas memperoleh atau melepaskan suatu aset atau menyelesaikan liabilitas yang didenominasikan pada mata uang asing.

mata uang rupiah digunakan oleh entitas ketika entitas mencatat transaksi yang terjadi dalam mata uang asing berdasarkan kurs tunai sesuai dengan tanggal transaksi tersebut. Tanggal transaksi merupakan transaksi yang pertama kali dapat memenuhi syarat pada pengakuan sesuai yang dengan SAK EMKM.

C. Penyajian Laporan Keuangan

Yang tertuang didalam SAK EMKM (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018:7) IAI mendeskripsikan bahwa suatu penyajian yang wajar dalam laporan keuangan harus sesuai dengan peraturan SAK EMKM serta pengertian laporan keuangan lengkap yang digunakan untuk entitas. Penyajian yang wajar memiliki penyajian yang jujur atas pengaruh suatu transaksi, kondisi ataupun peristiwa lain yang sesuai dengan kriteria pengakuan aset, liabilitas, beban dan juga penghasilan. Pengungkapan sangat diperlukan oleh entitas pada saat kepatuhan terhadap syarat tertentu yang tertuang didalam SAK EMKM tidak membantu pemakai dalam memahami suatu pengaruh transaksi, kondisi dan peristiwa lain atas posisi dan kinerja keuangan suatu entitas.

Persyaratan dalam penyajian wajar suatu laporan keuangan guna menyajikan suatu informasi supaya mencapai tujuan, tujuannya yaitu:

- a. Relevan, yaitu informasi yang digunakan pengguna dalam proses penerimaan keputusan.
- b. Representasi tepat, yaitu informasi laporan keuangan yang menampilkan secara tepat apa saja yang akan ditampilkan agar bebas dari suatu kesalahan material.
- c. Keterbandingan, yaitu informasi laporan keuangan suatu entitas yang dibandingkan melalui suatu periode dalam mengidentifikasi kinerja keuangan. Informasi pada laporan keuangan entitas bisa juga dibandingkan kepada entitas untuk mengevaluasi suatu kinerja keuangan.
- d. Keterpahaman, yaitu disajikannya suatu informasi yang sangat mudah dipahami oleh pengguna. Pengguna diperkirakan mempunyai pengetahuan dan kemauan yang sangat memadai untuk mempelajari suatu informasi tersebut secara wajar.

SAK EMKM akan membuat suatu pernyataan yang wajar dan jelas mengenai kepatuhan terhadap SAK EMKM dalam catatan atas laporan keuangannya jika laporan keuangan entitas telah sesuai dengan SAK EMKM. Suatu entitas tidak bisa mengartikan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM, kecuali laporan keuangan suatu entitas telah memenuhi seluruh standar yang tertuang didalam persyaratan SAK EMKM.

Entitas pada akhir setiap periode pelaporan keuangan harus menyajikan dengan lengkap suatu laporan keuangannya yang termasuk juga pada informasi komparatifnya. Penyajian dan klasifikasi suatu pos - pos pada laporan keuangan antar periode suatu entitas disusun dengan cara konsisten, kecuali:

1. Jika terjadinya perubahan yang sangat signifikan melalui sifat operasi suatu entitas, perubahan dalam suatu penyajian atau klasifikasi pada pos - pos dalam laporan keuangan yang dapat menghasilkan suatu penyajian yang lebih sesuai dengan pertimbangan suatu kriteria penerapan dan pemilihan kebijakan suatu akuntansi.
2. SAK EMKM dapat mensyaratkan perubahan dalam penyajiannya.
Jika suatu penyajian laporan keuangan diubah akibat penerapan tersebut, maka suatu entitas mengelompokkan suatu jumlah komparatif, kecuali jika kelompoknya tidak praktis. Maksud dari kata tidak praktis yaitu dimana kondisi suatu entitas tidak bisa menerapkan pengaturan setelah upaya dapat dilakukan.

D. Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan

Hasil dari suatu proses akhir pengikhtisarkan dan pencatatan suatu data transaksi bisnis merupakan pengertian dari laporan keuangan. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan suatu informasi posisi keuangan serta kinerja entitas yang sangat bermanfaat bagi sejumlah besar penggunaanya yang mengambil keputusan ekonomiknya. Dalam memenuhi tujuan laporan keuangan, laporan keuangan harus dapat menunjukkan suatu pertanggungjawaban kepada manajemen terhadap sumber daya yang dapat dipercayainya.

Laporan keuangan SAK EMKM minimum terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan

laporan posisi keuangan yang menyajikan suatu informasi tentang liabilitas, aset, dan ekuitas suatu entitas akhir periode pelaporan merupakan pengertian Menurut IAI dalam SAK EMKM (2018:9).

entitas yang mencakup pos - pos laporan posisi keuangan dapat dilihat sebagai berikut:

- a) Kas dan setara kas
- b) Piutang
- c) Persediaan
- d) Aset tetap
- e) Utang usaha
- f) Utang bank
- g) Ekuitas

Entitas yang menyajikan suatu pos pada bagian dari sebuah pos laporan posisi keuangan jika penyajian tersebut relevan untuk memahami posisi keuangan entitas. SAK EMKM tidak perlu menentukan suatu format atau urutan terhadap pos - pos yang disajikan. Walaupun demikian, entitas bisa menyajikan pos - pos aset yang berdasarkan urutan likuiditas dan liabilitas sesuai jatuh tempo. Contoh dalam laporan posisi keuangan berdasarkan SAK EMKM dapat dilihat pada gambar 1.

ENTITAS			
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7			
ASET	Catatan	20x8	20x7
Kas dan setara kas			
Kas	3	xxx	xxx
Giro	4	xxx	xxx
Deposito	5	xxx	xxx
Jumlah kas dan setara kas		xxx	xxx
Piutang usaha			
Persediaan	6	xxx	xxx
Beban dibayar di muka	7	xxx	xxx
Aset tetap		xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan		(xx)	(xx)
JUMLAH ASET		xxx	xxx
LIABILITAS			
Utang usaha			
Utang bank	8	xxx	xxx
JUMLAH LIABILITAS		xxx	xxx
EKUITAS			
Modal			
Saldo laba (defisit)	9	xxx	xxx
JUMLAH EKUITAS		xxx	xxx
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		xxx	xxx

Gambar 2.1. Laporan Posisi Keuangan

Sumber: SAK EMKM 2016

2. Laporan Laba Rugi

Menurut IAI dalam SAK EMKM (2018:11), Laporan laba rugi entitas menyajikan kinerja keuangan entitas untuk suatu periode. Laporan laba rugi entitas dapat mencakup pos - pos sebagai berikut:

- a) Pendapatan
- b) Beban keuangan
- c) Beban pajak

Untuk memahami dalam kinerja keuangan suatu entitas maka entitas harus menyajikan suatu pos pada laporan laba rugi yang relevan. Beban dan penghasilan yang diterima pada suatu periode dimasukkan kedalam laporan laba rugi namun pada SAK EMKM mempunyai syarat lain. Contoh laporan laba rugi berdasarkan SAK EMKM dapat dilihat pada gambar 2

ENTITAS			
LAPORAN LABA RUGI			
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7			
PENDAPATAN	Catatan	20x8	20x7
Pendapatan usaha	10	xxx	xxx
Pendapatan lain-lain		xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN		xxx	xxx
BEBAN			
Beban usaha		xxx	xxx
Beban lain-lain	11	xxx	xxx
JUMLAH BEBAN		xxx	xxx
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx
Beban pajak penghasilan	12	xxx	xxx
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx

Gambar 2.2. Lapran Laba Rugi

Sumber: SAK EMKM 2016

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan, informasi yang disajikan pada catatan atas laporan keuangan yaitu:

- a. pernyataan laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan SAK EMKM.
- b. Ikhtisar suatu kebijakan akuntansi.
- c. Berupa informasi dan rincian suatu pos yang dapat menjelaskan suatu transaksi yang penting sehingga dapat bermanfaat untuk pengguna dalam memahami laporan keuangannya.

Menurut PSAK Pasal 1 tahun 2017, laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan keuangan kinerja suatu entitas. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai informasi data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak - pihak yang berkepentingan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018a). fungsi dari laporan keuangan yaitu sebagai alat informasi yang dapat menghubungkan suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan, yang dapat menunjukkan suatu kondisi kesehatan keuangan dan kinerja perusahaan. (Hery, S.E., M.Si., CRP., 2016). Untuk mengetahui hasil usaha pada kurun waktu (periode akuntansi) tertentu, suatu perusahaan perlu menyusun laporan keuangannya. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan, sedangkan penyusunan laporan keuangan adalah tahap akhir dalam akuntansi.

Laporan keuangan akan menunjukkan keseluruhan kondisi keuangan suatu perusahaan. Dari sebuah laporan keuangan akan diketahui bagaimana kondisi

perusahaan tersebut, termasuk kelemahan dan keunggulan yang dimiliki. Keuntungan dari laporan keuangan adalah bahwa pihak manajemen perusahaan dapat memperbaiki dan meningkatkan kelemahan yang ada serta mempertahankan keunggulan yang dimiliki. Laporan keuangan harus memenuhi beberapa kondisi, yaitu: relevan, dapat dimengerti, dapat diuji, dapat dibandingkan, dapat dipercaya, lengkap, penyampaian yang tepat waktu, akurat, dan penyediaan objektif. Contoh catatan atas laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dapat dilihat pada gambar 3.

ENTITAS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7		
1. UMUM	Entitas didirikan di Jakarta berdasarkan akta Nomor xx tanggal 1 Januari 20x7 yang dibuat dihadapan Notaris, S.H., notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.xx 2016 tanggal 31 Januari 2016. Entitas bergerak dalam bidang usaha manufaktur. Entitas memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008. Entitas berdomisili di Jalan xxx, Jakarta Utara.	
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING		
a. Pernyataan Kepatuhan	Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.	
b. Dasar Penyusunan	Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.	
c. Piutang usaha	Piutang usaha disajikan sebesar jumlah tagihan.	
d. Persediaan	Biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian dan biaya angkut pembelian. Biaya konversi meliputi biaya tenaga kerja langsung dan <i>overhead</i> . <i>Overhead</i> tetap dialokasikan ke biaya konversi berdasarkan kapasitas produksi normal. <i>Overhead</i> variabel dialokasikan pada unit produksi berdasarkan penggunaan aktual fasilitas produksi. Entitas menggunakan rumus biaya persediaan rata-rata.	
e. Aset Tetap	Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.	
f. Pengakuan Pendapatan dan Beban	Pendapatan penjualan diakui ketika tagihan diterbitkan atau pengiriman dilakukan kepada pelanggan. Beban diakui saat terjadi.	
g. Pajak Penghasilan	Pajak penghasilan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.	
3. KAS	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
Kas kecil Jakarta – Rupiah	xxx	xxx
4. GIRO	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
PT Bank xxx – Rupiah	xxx	xxx
5. DEPOSITO	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
PT Bank xxx – Rupiah	xxx	xxx
Suku Bunga Deposito:		
Rupiah	<u>20x8</u> 4,50%	<u>20x7</u> 5,00%
6. PIUTANG USAHA	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
Toko A	xxx	xxx
Toko B	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx

Gambar 2.3. Catatan Atas Laporan Keuangan

ENTITAS			
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN			
31 DESEMBER 20x8 DAN 20x7			
7.	BEBAN DIBAYAR DI MUKA		
		<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
	Sewa	xxx	xxx
	Asuransi	xxx	xxx
	Lisensi dan perizinan	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
	Jumlah	xxx	xxx
8.	UTANG BANK		
	Pada tanggal 4 Maret 20x8, Entitas memperoleh pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dari PT Bank ABC dengan maksimum kredit Rpxxx, suku bunga efektif 11% per tahun dengan jatuh tempo berakhir tanggal 19 April 20X8. Pinjaman dijamin dengan persediaan dan sebidang tanah milik entitas.		
9.	SALDO LABA		
	Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban, setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik.		
10.	PENDAPATAN PENJUALAN		
		<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
	Penjualan	xxx	xxx
	Retur penjualan	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
	Jumlah	xxx	xxx
11.	BEBAN LAIN-LAIN		
		<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
	Bunga pinjaman	xxx	xxx
	Lain-lain	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
	Jumlah	xxx	xxx
12.	BEBAN PAJAK PENGHASILAN		
		<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
	Pajak penghasilan	xxx	xxx

Gambar 2.4. Lanjutan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sumber: SAK EMKM 2016

2.1.2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah salah satu pendorong perekonomian bangsa yang memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia karena dapat mendorong dan meningkatkan perekonomian secara berkelanjutan. (Nuvitasari et al., 2019). UMKM merupakan sebuah aktivitas dalam perekonomian yang bersifat kecil akan tetapi memiliki dampak yang sangat baik didalam perekonomian yang sedang dalam tahap perkembangan dan pertumbuhan (Sugiatni, 2022). UMKM mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun perekonomian negara, hal tersebut dikarenakan sektor UMKM merupakan penyumbang terbesar, paling banyak menyerap lapangan pekerjaan, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. UMKM bertujuan untuk mengembangkan serta menumbuhkan usahanya dalam membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Pertama kali pengertian UMKM yaitu tidak ada pembagian antara tugas yang jelas dari bidang operasi dan bidang administrasi. beberapa industri kecil dijalankan oleh perorangan yang juga merangkap sebagai pemilik usaha dan juga sebagai pengelola

perusahaan tersebut, mereka juga dapat memanfaatkan tenaga kerja dari teman, keluarga maupun kerabat dekatnya. Kedua, rendahnya suatu akses industri kecil kepada lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka menggunakan modal sendiri ataupun melalui sumber lain seperti kerabat, keluarga, bahkan rentenir. Ketiga, pada umumnya usaha kecil belum memiliki status badan hukum (Handayani, 2018).

Kriteria UMKM pada PP Nomor 7 Tahun 2021 berisi tentang berbagai macam regulasi kebijakan – kebijakan dalam aspek kemudahan pendirian usaha, fasilitas, perizinan, akses pembiayaan, akses ke rantai pasok dll. UU UMKM sebelumnya menetapkan bahwa kriteria UMKM yang disesuaikan berdasarkan kepada kekayaan yang bersih dan berasal dari penjualan tahunannya. Kriteria itu kemudian diubah menjadi UU ciptaker (Sugiatni, 2022).

Berikut merupakan Kriteria UMKM terbaru PP Nomor 7 Pasal 35 Tahun 2021:

- a. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- b. Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- c. Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - 1) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - 2) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - 3) Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- d. Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
- e. Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - 1) Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - 2) Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 - 3) Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- f. Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- g. Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian. (Kemudahan & Koperasi, 2008)

2.1.3. Analisis Laporan Keuangan Sederhana

Suatu aktivitas yang dilakukan agar dapat mengidentifikasi, menilai, membandingkan serta mengolah informasi yang berada dalam suatu laporan keuangan merupakan pengertian dari Analisis laporan keuangan.

1. Tujuan Analisis Laporan Keuangan
Beberapa tujuan analisis laporan keuangan perusahaan yaitu
 - a. Untuk menilai kinerja manajemen pada tahun berjalan
 - b. Sumber informasi dalam mengambil keputusan
 - c. Dapat mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan
 - d. Sebagai bahan evaluasi kinerja perusahaan

2. Prosedur Menjalankan Analisis Laporan Keuangan
dalam menganalisis suatu laporan keuangan maka langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut:
 - a. Memahami latar belakang data keuangan perusahaan
 - b. Memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan
 - c. Mengamati dan mempelajari laporan keuangan secara menyeluruh
 - d. Menganalisis laporan keuangan

3. Jenis-jenis Rasio
Rasio yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan terdiri dari 4 jenis rasio yaitu:
 - a. Rasio profitabilitas
 - b. Rasio Likuiditas
 - c. Rasio Solvabilitas
 - d. Rasio Aktivitas

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan sumber ilmu pengetahuan untuk penulis memahami dan memperkaya teori-teori yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini.

Penelitian Noval Roynaldo Sinaga (2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa Saft Handicraft masih melakukan pencatatan laporan keuangan secara konvensional dan belum mengimplementasikan SAK EMKM, hal itu disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk menerapkan SAK EMKM pada Saft Handicraft.

Penelitian Lastris Arlenta Sihite (2020), judul yang diambil oleh peneliti yaitu Penerapan SAK EMKM Pada UMKM Custom Kekinian. Alasan peneliti dalam mengambil judul tersebut yaitu UMKM Custom kekinian masih belum menerapkan standar yang harus digunakan dalam penyusunan dan pencatatan laporan keuangan, hal itu dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan keterbatasan waktu.

Penelitian Rizki Asrinda Handayani (2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM Farhan cake's tidak memperhatikan sistem akuntansi yang lazim, dimana proses pencatatan biaya tidak dilakukan sebagaimana mestinya, hal itu menyebabkan manajemen tidak akurat dalam membuat perencanaan laba dan pengendalian biaya, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk menerapkan SAK EMKM pada UMKM Farhan cake's.

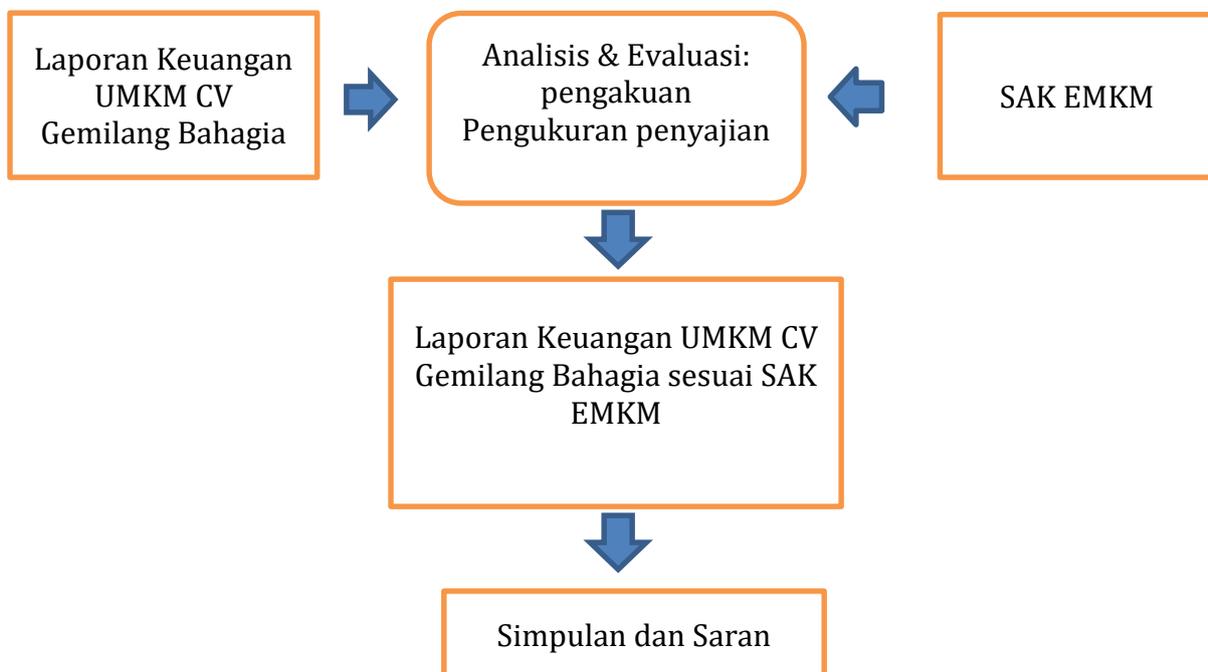
Penelitian Nurlaila (2018) hasil dari penelitian ini adalah Sukma Cipta Keramik belum menerapkan SAK EMKM karena keterbatasan waktu dan sumberdaya manusia serta belum ada tenaga akuntansi yang profesional pada Sukma Cipta Keramik, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk menerapkan SAK EMKM pada Sukma Cipta Keramik.

Penelitian Fransiskus damien (2017), penelitian yang berjudul Penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada peternakan. Peneliti mengambil judul penelitian tersebut untuk membantu peternak lele Fajar dalam melakukan pencatatan laporan keuangannya, hal tersebut dikarenakan peternak lele Fajar belum memahami tentang pencatatan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

Dari hasil para penelitian diatas, menunjukkan bahwa masih banyak UMKM yang belum menerapkan SAK EMKM dikarenakan kurangnya pemahaman serta kurangnya sumber daya manusia.

2.3. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan suatu cara untuk dapat memudahkan peneliti dalam menguraikan secara sistematis pokok permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dinyatakan dalam sebuah kerangka pemikiran yang ditunjukkan oleh gambar berikut:



Gambar 2.5. Kerangka Berpikir